

**PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA  
MEWUJUDKANPARTISIPASI AKTIF ANGGOTA DAN PERKEMBANGAN USAHA**  
(Studi Kasus Pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Ketemasdungus  
Kecamatan Puri)

Mifta Istiqfarotul Hikmah<sup>1)</sup>,Tatas Ridho Nugroho<sup>2)</sup>, Rubiyanto<sup>3)</sup>

UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT

[miftahikmah01@gmail.com](mailto:miftahikmah01@gmail.com)

**ABSTRAK**

Program PNPM Mandiri salah satunya yaitu simpan pinjam yang dikelola UPK dirancang dengan tujuan memberi kesempatan kepada masyarakat melalui simpan pinjam dengan menerapkan sistem tanggung renteng, dimana bentuk tanggung jawab akan ditanggung bersama oleh anggota kelompok atas dasar keterbukaan dan saling percaya, apabila ada satu anggota KSM yang menyimpang akan ditanggung oleh semua anggota KSM, sehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng, partisipasi aktif anggota KSM dan perkembangan usaha pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk selanjutnya menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penerapan sistem tanggung renteng sudah dilaksanakan dengan baik. 2) Partisipasi anggota KSM masih kurang dalam hal pembayaran angsuran tepat pada jatuh tempo. 3)Perkembangan usaha PNPM saat ini masih kurang baik, karena pinjaman bergulir berjalan kurang lancar, sehingga pengembalian pinjaman tidak sesuai perjanjian.

**Kata Kunci :** Sistem Tanggung Renteng Partisipasi Anggota Perkembangan Usaha

**ABSTRACT**

One of the PNPM Mandiri programs, namely savings and loans managed by UPK, was designed with the aim of providing opportunities for the community through savings and loans by implementing a joint responsibility system, where the form of responsibility will be shared by group members on the basis of openness and mutual trust, if there is one KSM member who deviates, it will be borne by all KSM members, so as to prevent bad credit.

This research aims to determine the application of the joint responsibility system, active participation of members and business development at the Urban PNPM Mandiri UPK, Ketemasdungus Village, Puri District. This type of research used in this research is descriptive qualitative research, data obtained through interviews, observation and documentation, then using the triangulation method. The results of this research indicate that 1) the implementation of the joint responsibility system has been implemented properly. 2) KSM members' participation is still lacking in terms of installment payments on due date. 3) The current PNPM business development is still not good, because revolving loans are not running smoothly, so the loan repayments are not in accordance with the agreement.

**Keywords:** Renteng Liability System, Member Participation, Business Development

## PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi secara global yang masih suram, menjadikan pemerintah memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan, untuk mengurangi tingkat kemiskinan pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satunya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), program pemberdayaan masyarakat ini terbesar di tanah air. Dana yang dikelola langsung disediakan dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang akan disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan, dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.

Salah satunya digunakan pada program UPK yaitu simpan pinjam bergulir yang menerapkan “Sistem tanggung renteng, Sistem tanggung renteng adalah sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, menerapkan konsep kolektifitas, mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapinya, menurut” (Supriyanto G., 2011) didalam sistem tanggung renteng terkandung hak yang bersifat menjamin ketaatan dalam pembayaran angsuran. Penerapan sistem tanggung renteng juga dapat mempengaruhi semua anggota menjadi ikut berfikir, bekerja, saling bergotong royong, dan bertanggung jawab (Andriani, 2001).

Kegiatan penerapan sistem tanggung renteng dapat menjadi cara PNPM Mandiri untuk mewujudkan partisipasi aktif para anggotanya. ”Karena sistem tanggung renteng memiliki arti kebersamaan. Partisipasi adalah suatu hal yang sangat mendukung dalam keberhasilan suatu organisasi dan perkembangan organisasi, dengan dukungan partisipasi aktif anggota maka tujuan organisasi dapat terrealisasi” (Dewi, 2013). Oleh karena itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem tanggung renteng, partisipasi anggota KSM pada UPK dan perkembangan usaha PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri.

## KAJIAN LITERATUR

### Sistem Tanggung Renteng

Menurut (Suharni, 2003) “Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah. Tanggung renteng ialah kelompok yang membagikan semua urusan kelompoknya kepada anggota secara merata dan adil, apabila ada seseorang anggota yang mengalami masalah maka semua anggota berhak membantu dan bertanggung jawab, simbol tersebut “*Ti ji tibeh*” yang memiliki arti “*mati siji mati kabeh*” atau “*mukti siji mukti kabeh*”. “Pada tahun 1945 para pejuang mengatakan kata tersebut untuk memotivasi perjuangannya” (Hadi, 2008). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1991) “Tanggung Renteng berasal dari kata Tanggung dan Renteng yang berarti memikul, menjamin, bersedia membayar kewajiban anggota kelompoknya apabila terjadi pada anggota yang tidak mampu membayar kewajibannya, sedangkan kata perkreditan Tanggung Renteng diartikan sebagai tanggung jawab antara pemberi pinjaman dengan peminjamnya atas hutang yang di buatnya”.

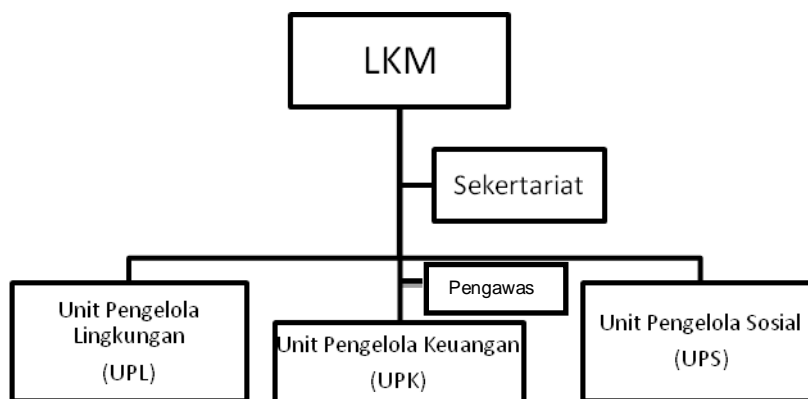
Pemerintah memiliki tujuan pada dana tanggung renteng yang di turunkan untuk masyarakat yaitu : 1) Membantu masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal; 2) Agar masyarakat dapat berwirausaha; 3) Dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal dalam usahanya; 4) Agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik (Alam, 2007). Menurut (Ramdani, 2018) “Penerapan tanggung renteng tidak selamanya sesuai dengan tujuan kelompok dan LKM oleh karena itu ada kriteria supaya tanggung renteng tersebut dapat berjalan secara efektif dan memberdayakan kelompok, sehingga dapat memenuhi kriteria tersebut dengan cara yaitu”: 1) Kelompok telah teruji

untuk jangka waktu yang cukup lama; 2)Memiliki ketua kelompok yang berkarakter baik; 3) Para anggota kelompok memperoleh pinjaman yang hampir sama besarnya (sesuai dengan kebutuhan kebutuhan anggota yang mendesak); 4) Para anggota kelompok bersedia menyetor jumlah angsuran yang sesuai dengan jumlah uang pinjamannya sesuai dengan yang sudah di syaratkan; 5) Masing masing kelompok memiliki ketua yang bersedia memenuhi syarat availsbagi anggotanya yang sedang memerlukan kredit tetapi tidak memiliki agunan.

### Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Operasionalnya dibentuk sebuah lembaga yang mengelola kegiatan di tingkat desa yang disebut Unit Pengelola Keuangan (UPK), UPK ini bertugas mendistribusikan bantuan keuangan yang berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)”kepada masyarakat yang mendapat bantuan program setelah dilakukan musyawarah antara LKM, para UP dan RT, RW yang”menjadi”prioritas usulan. Dalam bantuan ini, terdapat dua program yaitu bantuan nfrastruktur dan bantuan kegiatan ekonomi, salah satu kegiatan ekonomi adalah bantuan modal bagi para perempuan yang tergabung dalam”suatu”kelompok”yang”biasa disebut dengan[Kelompok]Swadaya” Masyarakat(KSM)

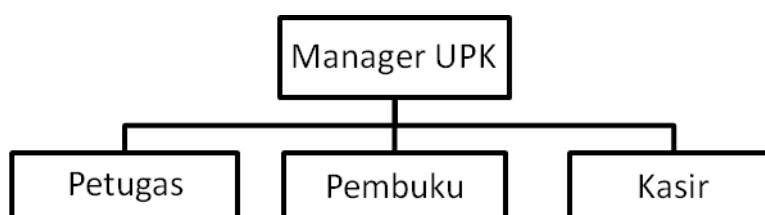
Gambar 1 2 Struktur Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)



Sumber :UPK PNPM Ds. Ketemasdungus Kec. Puri

LKM, yaitu pemimpin kolektif 9-13 orang yang bersama masyarakat bertugas menyusun kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.Sekretariat, petugas yang diangkat oleh LKM yang bertugas untuk mengelola administrasi organisasi dan keuangan LKM.Pengawas, anggota masyarakat yang diangkat LKM dan memiliki kemampuan untuk mengawasi dan membina kegiatan UPK/pengelolaan pinjaman bergulir, berjumlah 2-3 orang.UPK, Unit kerja yang terdiri dari 2-4 orang tenaga yang diangkat oleh LKM untuk melakukan tugas mengelola kegiatan pinjaman bergulir.UPL, Unit kerja yang diangkat oleh LKM untuk melakukan tugas mengelola kegiatan-kegiatan infrastruktur/ lingkungan.UPS, Unit kerja yang diangkat oleh LKM untuk melakukan tugas mengelola kegiatan-kegiatan sosial.Invalid source specified.

Gambar 2 Struktur Ideal UPK



Sumber :UPK PNPM Ds. Ketemasdungus Kec. Puri

Manager UPK sebagai pemimpin UPK, harus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang ada di UPK kepada LKM. Petugas Pinjaman, bertanggung jawab kepada manajer UPK dalam hal menangani semua simpan pinjam yang ada di UPK, bertugas mempromosikan, memeriksa, membina pinjaman mengusulkan, dan menagih angsuran ke anggota KSM. Pembuku, melakukan kegiatan pembukuan dan melaporkan keuangan. Kasir, bertanggung jawab ke manajer UPK, Petugas UPK bertugas mengelola kas UPK dan akan dipertanggung jawabkan kepada manajer UPK.

## Partisipasi

“Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan PNPM, partisipasi yang rendah akan menghambat perkembangan PNPM sehingga PNPM tidak dapat mencapai tujuannya dengan baik. Secara istilah partisipasi diambil dari bahasa asing *Participation*, yang artinya mengikut sertakan pihak lain dalam mencapai tujuannya”(Hendar, 2005). Golongan Partisipasi Anggota menurut (Hendar, 2002) “partisipasi anggota dapat digolongkan menjadi tiga partisipsi, yaitu : 1) Partisipasi dalam bidang permodalan, yaitu untuk membiayai pertumbuhan UPK, kontribusi keuangan bisa berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela; 2) Partisipasi dalam bidang organisasi, yaitu dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan tujuan dan kebijakan serta proses pengawasan jalannya UPK yang harus melibatkan anggota karena anggota pemilik UPK; 3) Partisipasi dalam pemanfaatan jasa usaha, dilakukan untuk pertumbuhan PNPM, anggota sebagai pelanggan harus memanfaatkan setiap layanan dari UPK, manfaat yang akan diperoleh anggota tersebut semakin banyak sehingga kesadaran dalam pelaksanaan partisipasi kontributif akan semakin meningkat”.

## Perkembangan

Menurut (Vinanda, 2013)“Pengembangan adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnispun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sambil memperoleh laba”. Cara mengukur Perkembangan Usaha dapat dilihat dari perkembangan modal simpan pinjam UPK setiap tahunnya dan tingkat pengembalian simpan pinjam bergulir berjalan dengan lancar dan sesuai perjanjiannya. Karena dana dialokasikan ke UPL (Unit Pengelola Lingkungan) dan UPS (Unit Pengelola Sosial) untuk Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar (pembangunan infrastruktur) yang dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek maupun jangka panjang kepada masyarakat seperti pembangunan atau perbaikan jalan dan saluran air di depan rumah masyarakat seluruh desa. Pembagian sembako diberikan kepada masyarakat desa yang kurang mampu, bedah rumah kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

## Metode Penelitian

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di rumah para pengurus dan rumah anggota KSM UPK PNPM Mandiri Desa Ketemasdungus KecamatanPuri

### Informan Penelitian

Gambar 3 Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Jumlah
1	Pengurus UPK	2 Orang
2	Anggota KSM	9 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>11 Orang</b>

Informasi juga bisa didapat dari dokumen/sumber tertulis sebagai data pendukung yang diambil dari jurnal, buku, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sebagai sumber data lainnya bersifat melengkapi data utama.

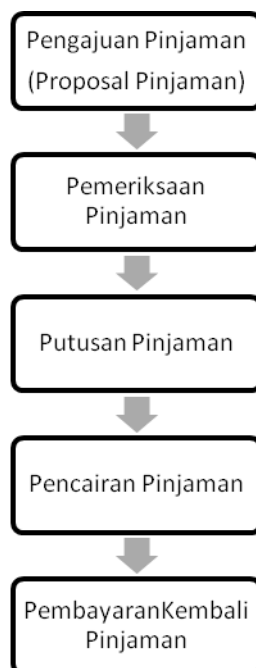
### Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh datanya secara langsung dari sumbernya melalui metode wawancara, sementara data sekunder diperoleh datanya melalui data-data yang ada di PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Ketemasdungus Kecamatan Puri.

### Hasil dan Pembahasan

#### Mekanisme Pelaksanaan Simpan pinjam KSM

Gambar 4 Tahap Pinjaman Begulir UPK PNPM Ds. Ketemasdungus



Sumber :(Sulistiyoningrum, 2010)

Mekanisme pelaksanaan simpan pinjam agar dapat dipahami secara benar oleh masyarakat khususnya anggota KSM yakni dengan cara membentuk kelompok terlebih dahulu minimal anggota terdiri dari 5 orang, dan dalam satu kelompok harus memiliki ketua untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan kelompoknya. Kegiatan musyawarah perguliran dana simpan pinjam dilakukan selama 10 bulan sekali pada saat penyusunan proposal. Pengajuan pinjaman dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman yang melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- Pembuatan proposal pengajuan oleh ketua kelompok sebagai salah satu persyaratan pinjaman yang berisi identitas setiap anggota, jenis usaha yang dijalankan dan besarnya pengajuan pinjaman. Setiap anggota tidak boleh meminjam lebih dari Rp. 4.000.000,00
- Menyerahkan proposal pada pihak UPK dan disertakan lampirannya yaitu foto kopi KTP dan KK.
- Mengisi surat perjanjian pinjaman hutang.

Setelah tahap pengajuan proposal selesai, maka akan dilakukan penyeleksian dengan survey lapangan yang akan dilakukan: oleh tim dari UPK untuk memperoleh informasi kelayakan

mendapatkan pinjaman dana bergulir, setelah mendapatkan verifikasi dana akan dicairkan pada waktu tertentu.

### **Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng**

Dalam pelaksanaannya, Sistem tanggung renteng yaitu bertanggung jawab secara bersama dalam upaya menghindari kredit macet yakni berupa simpanan yang disebut sebagai tanggung renteng yang berasal dari setiap anggota 5% jumlah pinjaman, sebelum pencairan. Sistem ini berfungsi untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran lebih dari jatuh tempo, sehingga akan ditanggulangi terlebih dahulu dari tanggung renteng tersebut.

### **Penyajian Data**

#### ***a. Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada UPK PNPM Mandiri Perkotaan Desa Ketemasdungus Kec. Puri***

Berdasarkan hasil wawancara pada pengurus UPK dan para anggota KSM bahwa UPK PNPM Mandiri Desa Ketemasdungus Kec.Puri sudah menerapkan sistem tanggung renteng dengan memiliki kelompok simpan pinjam yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kegiatan simpan pinjam KSM sama seperti kegiatan ibu-ibu arisan rumah tangga, dan dalam simpan pinjam di UPK memiliki kemudahan dengan tidak diberikan anggunan saat melakukan pinjaman, hanya membayar tanggung renteng sebesar 5% dari jumlah pinjaman sebelum pencairan. Tetapi penerapan sistem tanggung renteng akan membantu apabila terjadi anggota KSM yang tidak mampu membayar maka anggota lain akan menanggung angsuran. Oleh karena itu proses pengajuan pinjaman harus diputuskan melalui musyawarah yang diputuskan bersama dalam satu kelompok, lalu membuat proposal pinjaman dan akan diputuskan oleh UPK. Penerapan sistem tanggung renteng sudah sesuai yang ada di buku yang berjudul Analisis Pengembangan usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng Menurut (Suharni, 2003) menyebutkan “Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah”.

Penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yaitu oleh (Ramdani, 2018) bahwa penelitiannya sama membahas tentang penerapan sistem tanggung renteng disuatu lembaga, dengan adanya simpan pinjam bergulir jasa simpan pinjam dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi anggota KSM tetapi juga untuk masyarakat miskin di Desanya. Penelitian terdahulu mendapatkan hasil bahwa objek tersebut masih belum sepenuhnya menjalankan sistem tanggung renteng hanya sebagai pemenuhan syarat permohonan pinjaman saja, sedangkan dipenelitian ini sistem tanggung renteng sudah berjalan dengan baik.

#### ***b. Partisipasi Anggota KSM pada UPK PNPM Mandiri Desa Ketemasdungus Kec. Puri***

Penerapan sistem tanggung renteng di UPK PNPM Mandiri Desa Ketemasdungus Kec. Puri dapat mewujudkan partisipasi aktif anggota yang dijelaskan menurut (Hendar, 2002) digolongkan menjadi tiga partisipasi, yaitu :

##### **1) Partisipasi dalam bidang permodalan**

Partisipasi dalam bidang permodalan dapat dilihat dari keaktifan anggota dalam membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian. sehingga dapat menambah modal yang dimiliki oleh UPK. Hasil dari wawancara pada pengurus dan para anggota KSM menyatakan bahwa dengan adanya penerapan sistem tanggung renteng, partisipasi aktif anggota dalam bidang permodalan dapat terwujud// seluruh pembayaran angsuran akan dikoordinir secara berkelompok oleh ketua kelompok, dan harus diserahkan ketua KSM ke UPK maksimal satu hari setelah jatuh tempo. Hal ini membuat anggota disiplin dan tepat waktu dalam membayar angsuran. Dengan demikian, modal yang dimiliki UPK akan lebih terkendali. Akan tetapi berdasarkan

hasil wawancara dengan salah satu anggota KSM bahwa partisipasi anggota masih kurang baik karena masih adanya anggota yang membayar tidak sesuai jatuh tempo.

Berdasarkan data kolektabilitas UPK diketahui bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2019 partisipasi anggota mengalami penurunan, karena masih ada beberapa kelompok macet sampai tahun 2020.

2) Partisipasi dalam bidang organisasi

Partisipasi dalam bidang organisasi dapat dilihat dari keaktifan anggota dalam mengikuti kegiatan rutin, hasil dari wawancara peneliti pada pengurus dan para anggota KSM menyatakan bahwa anggota KSM sangat berpartisipasi dimulai dari saat musyawarah sebelum pencairan untuk membahas pengajuan proposal pinjaman dilakukan 10 bulan sekali, pembayaran ke ketua KSM setiap bulannya, dan saat pencairan.

3) Partisipasi dalam bidang pemanfaatan jasa usaha

Partisipasi dalam bidang pemanfaatan jasa usaha dapat dilihat dari keaktifan anggota dalam memanfaatkan jasa usaha yang ada di PNPM Mandiri Desa Ketemasdungus Kec. Puri yaitu dengan menyimpan dan meminjam di Unit Pengelola Keuangan (UPK).

Oleh karena itu di UPK Desa Ketemasdungus Kec. Puri dengan menerapkan sistem tanggung renteng, partisipasi anggota dalam menyimpan dan meminjam di unit simpan pinjam UPK akan lebih terkoordinir dan terkendali. Apabila terdapat anggota yang sering menunggak atau membuat kelompok hampir macet tidak akan mendapatkan kesempatan lagi meminjam di UPK.

Hasil dari observasi bahwa dengan menerapkan sistem tanggung renteng membuat anggota untuk meminjam ke simpan pinjam UPK, karena syaratnya yang mudah, tanpa adanya anggunan, akan di tanggung bersama satu kelompok sehingga menyelesaikan masalah dengan lebih mudah.

**c. *Perkembangan Usaha PNPM Mandiri Perkotaan Desa Ketemasdungus Kec. Puri***

Perkembangan usaha yang ada di PNPM Desa Ketemasdungus dapat dilihat dari perkembangan modal setiap tahunnya, modal awal didapat dari pusat (dana APBN dan APBD) salah satunya digunakan dalam kegiatan simpan pinjam bergulir pada program UPK. Meningkatnya modal Perkembangan usaha PNPM Mandiri Desa Ketemasdungus ini tidak terlepas dari partisipasi aktif dari anggota dalam membayar”angsuran secara teratur sesuai jatuh tempo. Hasil dari observasi bahwa data kolektabilitas simpan pinjam periode tahun 2019 menunjukkan anggota KSM masih ada yang kurang partisipasi dalam membayar angsuran sehingga terjadinya penunggakan dan bisa menimbulkan kelompok macet

***Upaya Peningkatan Partisipasi Aktif Anggota***

Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anggota baik menggunakan pendekatan materi maupun non materi. Pendekatan materi yaitu memberi bonus saat pelunasan kepada anggota yang setiap bulan membayar angsuran ke ketua KSMnya secara teratur dan sesuai jatuh tempo. Anggota juga bisa mendapatkan pinjaman lebih besar jumlahnya pada periode selanjutnya dari periode sebelumnya. Pendekatan non materi yaitu memberikan motivasi kepada semua anggota, dengan jalan mengikutsertakan semua anggota dalam proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan.

***Upaya Peningkatan Perkembangan Usaha***

Meningkatkan perkembangan usaha dilakukan melalui peningkatan modal UPK yang dilaksanakan oleh pengurus UPK dalam hal penertiban pembayaran angsuran. Apabila terjadi penunggakan maka akan dilakukan penagihan angsuran oleh pengurus UPK ke rumah anggota yang menunggak, meskipun dilakukan upaya tersebut anggota masih ada yang belum bisa memberikan angsuran secara penuh, hanya mampu membayar angsuran seadanya yang dimilikinya, disebabkan karena keterbatasan ekonomi. Namun hal tersebut dapat membantu menurunkan jumlah piutang usaha

UPK, sehingga bisa meningkatkan modal UPK sebagai modal simpan pinjam dana bergulir dan Pengurus bisa menggunakan tim penagih anggota yang menunggak,

#### **KESIMPULAN**

1. Penerapan sistem tanggung renteng pada UPK PNPM Mandiri Desa Ketemasdungus Kec. Puri sudah diterapkan dengan baik, sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit macet, tetapi masih ada beberapa anggota KSM yang kurang sadar akan tanggung jawabnya membayar ke ketua KSM.
2. Partisipasi anggota KSM masih kurang, karena adanya masalah ekonomi yang membuat anggota KSM tidak mampu dalam mengangsur angsuran secara teratur.
3. Perkembangan usaha simpan pinjam masih kurang baik karena pinjaman bergulir tidak bisa berjalan secara lancar disebabkan adanya tingkat pengembalian yang terus menurun

Upaya peningkatan partisipasi anggota dilakukan dengan menggunakan materi dan non materi, materi memberi bonus, kemudahan meminjam. Peningkatan non materi yaitu mengikutsertakan semua anggota dalam proses perencanaan dan proses pengambilan keputusan, sehingga anggota merasa dianggap penting dalam hal yang menyangkut kelompoknya.

Upaya meningkatkan perkembangan usaha dilakukan melalui peningkatan modal UPK, pengurus UPK melakukan penagihan ke rumah apabila terjadi penunggakan, pengurus juga bisa menggunakan tim penagih dari anggota LKM



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2007). *Perekonomian Masyarakat*. Yogyakarta: Arie Offse.
- Andriani, S. d. (2001). *Bunga Rampai tanggung Renteng*. Malang: Puskowajanti LIMPAD.
- Dewi, S. N. (2013). "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur".
- Hendar, K. d. (2002). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekoomi.
- Hendar, K. d. (2005). *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ramdani. (2018). Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabuten Tasikmalaya). *Al Amwal*, 103.
- Rahayu, Y. S. (2008). Penerapan Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Wanita Serba Usha "Setia Budi Wanita" Malang. 2.
- Rajo, P. M. (n.d.). Retrieved Mei Sabtu, 2020, from <https://pnpmtamanrajo.wordpress.com/peran-pelaku-pnpm-mpd-kecamatan/unit-pengelola-kegiatan-upk/>
- Setiawan, A. h. (2004). Peningkatan Partisipasi Anggota Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Usaha Koperasi. *Dinamika Pembangunan*, 42.
- Suharni. (2003). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 1*.
- Sulistiyoningrum, S. (2010). Implementasi Pemberian Kredit Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat di Kelurahan Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.
- Supriyanto, G. (2011). Aplikasi Sistem Tanggung Renteng . *Kopwan Setia Bhakti*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vinanda, P. (2013). *Ada Beberapa Definisi Pengembangan Usaha Menurut Para Ahli*. Retrieved Juni Minggu, 2020, from Academia: [https://www.academia.edu/8665059/Ada\\_beberapa\\_definisi\\_pengembangan\\_usaha\\_menurut\\_para\\_ahli](https://www.academia.edu/8665059/Ada_beberapa_definisi_pengembangan_usaha_menurut_para_ahli)
- Wibowo, L. (2014, 08). Retrieved mei Sabtu, 2020, from <http://kerja-membangun-desas.wordpress.com/2015/08/14/upk-dan-dana-bergulir-dalam-konteks-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>